

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2

0

2

1



**DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (LAKIP Dinsos) Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dimasa transisi dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance).

Seiring dengan upaya merealisasikan perwujudan pemerintahan yang baik Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah yang secara sistematis telah dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026, Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu : **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**. Visi ini mengandung arti untuk mewujudkan masyarakat Sulteng yang Maju, Damai, Sejahtera dan mandiri menuju percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. untuk melakukan pengembangan kapasitas masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam pembangunan. Kemandirian merupakan tujuan akhir penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dimana kondisi

PMKS terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Pembangunan kesejahteraan sosial , Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah mengevaluasi, menganalisa dan menetapkan beberapa strategi dalam implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 antara lain dengan mengutamakan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan serta pengendalian dan pengawasan terhadap capaian kinerja secara periodik sehingga konsisten dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

Hasil laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan mencapai target sasaran yang telah ditetapkan sehingga pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan capaian kinerja Pembangunan kesejahteraan sosial sangat baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021.

Palu, 14 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah



Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199103 2 006

DAFTAR ISI

1. HALAMAN JUDUL
2. RINGKASAN EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA	2
	1.3 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	26
	1.4 SISTIMATIKA LAKIP.....	30
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	31
	2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	32
	2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	36
	2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	37
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	41
	3.1 CAPAIAN KINERJA	41
	3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021	41
	3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016-2021	53
	3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DAN TARGET RPJMD 2016-2021	63
	3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	65
	3.1.5 PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	66
	3.1.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	75
	3.2 REALISASI ANGGARAN	80
BAB IV	PENUTUP	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dengan dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wajah dan gambaran pertanggung jawaban konsistensi dan komitmen sebuah organisasi perangkat daerah melaksanakan visi dan misi organisasinya.

Untuk mencapai Akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah yang baik, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat khususnya dibidang sosial. Hal tersebut juga di dukungdengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan sosial merupakan salah satu dari urusan wajib pelayanan dasar, dengan harapan dapat mewujudkan dan menegaskan optimalisasi penanganan permasalahan sosial yang terdiri dari Kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan atau ketertinggalan serta akibat bencana alam dan akibat bencanasosial (26 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akan menjadi mitra pemerintah dalam rangka penanganan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

1.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

1.2.1 ISU STRATEGIS

Kondisi saat ini, Provinsi Sulawesi Tengah masih terus dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks baik secara kualitas maupun kuantitasnya meliputi :

a). Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial. Oleh karena itu, masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar.

Kemiskinan juga merupakan salah satu dampak negatif pembangunan yang kasat mata dimana penanganan serta pengentasannya telah menjadi program prioritas baik pemerintah Pusat maupun Daerah. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendasari Pemerintah untuk mempunyai database penduduk miskin melalui Program Pendataan Perlindungan Sosial atau yang dikenal dengan PPLS pada tahun 2011 sehingga intervensi program kegiatan pengentasan lebih tepat isi dan tepat sasaran. Adapun, indikator yang digunakan adalah pengeluaran perkapita seseorang selama sebulan terhadap kesanggupan untuk memenuhi standar hidup minimal. Diawali tahun 2015, Kementerian Sosial secara giat menginstruksikan seluruh Instansi Sosial Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi terhadap data fakir miskin dan orang tidak mampu serta melaporkan secara online melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) untuk ditetapkan oleh Menteri Sosial. Penetapan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang terakomodir dalam Basis Data Terpadu sesuai Kepmensos No. 19/HUK/2020 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan sesuai dengan Kepmensos Nomor 146/HUK/2020 diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020

No	Kode	Kab/Kota	DTKS 2020 (KEPMENSOS NO. 146/HUK/2020)	
			RT	ART (JIWA)
1	7201	BANGGAI KEPULAUAN	15.211	54.145
2	7202	BANGGAI	41.469	150.451
3	7203	MOROWALI	13.591	46.391
4	7204	POSO	30.354	110.712
5	7205	DONGGALA	36.070	153.115
6	7206	TOLI-TOLI	25.533	101.346
7	7207	BUOL	19.451	79.461
8	7208	PARIGI MOUTONG	55.995	225.626
9	7209	TOJO UNA-UNA	18.638	69.397
10	7210	SIGI	30.662	114.765
11	7211	BANGGAI LAUT	4.991	18.590
12	7212	MOROWALI UTARA	11.925	43.214
13	7213	KOTA PALU	19.952	87.370
		Z_TOTAL	323.842	1.254.583

Sumber :DTKS 2020 (Kepmensos Nomor 146/HUK/2020)

b). Kecacatan

Kecacatan diartikan sebagai terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktural anatomi, psikologi maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.

Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran dan keterasingan. Kecacatan yang sedang marak dan meningkat populasinya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mengalami pemasangan. Kondisi ketidaktahuan masyarakat mengenai hak ODGJ di pasung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang –undang menjadi perhatian serius pemerintah sehingga disusun langkah langkah yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) sebagai bentuk preventif dan penanganan. Adapun data penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Penyandang Disabilitas
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No	KABUPATEN / KOTA	P. Disabilitas		NO	RAGAM DISABILITAS	KAB	KAB	KAB	KAB	KAB	KOTA	KAB	KAB	KAB	KAB	KAB	JUMLAH		
		Panti	Bukan Panti			BUOL	PARIMO	TOUNA	SIGI	BALUT	MORUT	PALU	BANGKEP	BANGGAI	MOROWALI	POSO		DONGGALA	TOLI TOLI
1	Kab. Banggai Kepulauan		571	1	Tuna daksa/ Disabilitas tubuh	259	565	254	325	89	172	284	138	524	128	487	398	302	3925
2	Kab. Banggai		2214	2	Tuna netra/buta	204	372	138	215	47	100	113	92	428	105	202	284	187	2487
3	Kab. Morowali	50	533	3	Tuna rungu	144	198	73	165	44	64	35	53	258	41	176	141	120	1512
4	Kab. Poso		1781	4	Tuna wicara	76	236	64	149	27	54	76	43	159	51	173	133	100	1341
5	Kab. Donggala		1692	5	Tuna rungu & wicara	40	92	33	70	11	35	33	26	69	17	94	63	46	629
6	Kab. Toli-Toli		1135	6	Tuna netra & Disabilitas tubuh	45	64	19	49	3	27	13	25	66	22	45	60	37	475
7	Kab. Buol		1217	7	Tuna netra, rungu, & wicara	17	26	7	27	-	9	10	2	22	9	18	16	10	173
8	Kab. ParigiMoutong		2324	8	Tuna rungu, wicara, & Disabilitas tubuh	23	39	18	37	3	18	20	9	41	7	38	30	25	308
9	Kab. Tojo Una-Una		879	9	Tuna rungu, wicara, netra, & Disabilitas tubuh	18	57	12	22	3	11	15	8	36	11	23	41	12	269
10	Kab. Sigi		1475	10	Disabilitas mental retardasi	114	270	102	136	49	97	125	70	243	84	236	197	112	1835
11	Kab. BanggaiLaut		315	11	Mantan penderita gangguan jiwa	53	126	48	87	10	37	51	26	105	25	83	139	40	830
12	Kab. Morowali Utara		734	12	Disabilitas fisik & mental	224	279	111	193	29	110	95	79	263	83	206	190	144	2006
13	Kota Palu	97	773		Jumlah	1217	2324	879	1475	315	734	870	571	2214	583	1781	1692	1135	15.790,00
JUMLAH DISABILITAS		147	15.643																

Sumber : DTKS 2020 (Kepmensos Nomor 146/HUK/2020)

Tabel 1.3
Data Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ODGJ (JIWA)
1	2	3
1.	BANGGAI	611
2.	BANGGAI KEPULAUAN	303
3.	BANGGAI LAUT	88
4.	BUOL	391
5.	DONGGALA	526
6.	KOTA PALU	271
7.	MOROWALI	192
8.	MOROWALI UTARA	244
9.	PARIGI MOUTONG	675
10.	POSO	525
11.	SIGI	416
12.	TOJO UNA-UNA	261
13.	TOLI-TOLI	296
TOTAL		4.799

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

c). Keterlantaran

Keterlantaran yang dimaksud adalah penelantaran terhadap anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing di era globalisasi. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Begitupun dengan lanjut usia, era globalisasi telah melunturkan budaya timur yang begitu menghormati orang tua dan orang yang lebih tua sehingga kondisi sekarang,

banyak anak tidak mempedulikan orang tua dan menganggap orang tua sebagai tambahan beban hidup yang semakin meningkat. Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah, remaja dan lanjut usia.

Di Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun atau kategori anak (sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020) sebanyak 1.121.193 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin untuk penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun sebanyak 420.620 Jiwa (sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020). Sedangkan jumlah penduduk usia di atas 60 tahun sebanyak 249.592 Jiwa (sumber : Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2020) sedangkan jumlah penduduk lanjut usia miskin adalah 118.140 Jiwa (sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020). Kemiskinan merupakan salah satu sebab utama anak mengalami penelantaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 37,51 % dari jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 18 tahun yang ada di Sulawesi Tengah berpotensi mengalami penelantaran. Sedangkan lanjut usia sebanyak 47,33 % yang berpotensi mengalami penelantaran.

Sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, bahwa jenis PMKS terkait anak terdiri dari Anak balita, Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak jalanan, Anak dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Adapun data anak terlantar pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Data Anak Terlantar Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK TERLANTAR (JIWA)
1	2	3
1.	BANGGAI	46.191
2.	BANGGAI KEPULAUAN	18.357
3.	BANGGAI LAUT	6.942

4.	BUOL	28.701
5.	DONGGALA	55.159
6.	KOTA PALU	28.036
7.	MOROWALI	15.162
8.	MOROWALI UTARA	14.385
9.	PARIGI MOUTONG	78.187
10.	POSO	33.163
11.	SIGI	37.321
12.	TOJO UNA-UNA	23.678
13.	TOLI-TOLI	35.302
TOTAL		420.620

Sumber : DTKS 2020 (Kepmensos Nomor 146/HUK/2020)

Sedangkan Jumlah Lanjut Usia Terlantar sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Lanjut Usia Terlantar Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR (JIWA)
1	2	3
1.	BANGGAI	18.242
2.	BANGGAI KEPULAUAN	6.121
3.	BANGGAI LAUT	1.645
4.	BUOL	6.337
5.	DONGGALA	12.479
6.	KOTA PALU	6.932
7.	MOROWALI	4.804
8.	MOROWALI UTARA	5.071
9.	PARIGI MOUTONG	18.339
10.	POSO	13.296
11.	SIGI	10.109
12.	TOJO UNA-UNA	6.285

13.	TOLI-TOLI	8.480
TOTAL		118.140

Sumber : DTKS 2020 (Kepmensos Nomor 146/HUK/2020)

d). Ketunaan Sosial dan penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang bertaqwa, profesional dan handal. Masalah ketunaan sosial yang ada di Sulawesi Tengah yang merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis yang mulai bermunculan, kelompok minoritas, tuna susila, eks narapidana atau bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dan penderita HIV/AIDS.

Selain disebabkan masalah kemiskinan, ketunaan sosial juga merupakan akibat dari ketidakmampuan kelompok tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga keberfungsian sosial mereka terganggu. Adapun data tuna sosial sebagai berikut :

Tabel 1.6
Data Tuna Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	Napza	Napi Umum	Napi Teroris	Kelompok Minoritas	KPO	Odha	Gelandangan	Pengemis	KTK	Tuna Susila
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Banggai Kepulauan	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Banggai	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-
03	Morowali	21	105	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Poso	174	121	22	34	-	70	-	-	-	-
05	Donggala	91	647	-	-	-	-	50	-	272	-
06	Toli-Toli	-	253	-	124	75	-	-	-	89	80
07	Buol	-	91	-	3	-	-	-	5	-	10

08	Parigi Moutong	27	111	-	35	55	2	43	-	17	27
09	Tojo Una-Una	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sigi	58	113	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Banggai Laut	20	44	-	10	-	-	-	-	-	7
12	Morowali Utara	22	41	-	-	-	-	-	-	-	24
13	Kota Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-
Jumlah		438	1.526	22	206	130	118	93	5	499	148

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

e). Keterpencilan/Ketertinggalan

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan baik dari segi geografis maupun sosial budaya yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 16.472 KK Komunitas Adat Terpencil tersebar di 192 lokasi, 65 kecamatan, 11 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi calon lokasi pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tahun 2015-2019. Penambahan kuantitas baik jumlah Kepala Keluarga, jumlah lokasi, kecamatan dan jumlah kabupaten merupakan dampak dinamika pemekaran wilayah dan pertumbuhan penduduk. Dari 11 kabupaten yang ada, kabupaten Sigi dan Kabupaten Tolitoli merupakan wilayah terbanyak lokasi Komunitas Adat Terpencil yaitu Kabupaten Sigi terdiri dari 12 kecamatan 38 lokasi dan Kabupaten Tolitoli terdiri dari 10 kecamatan dan 46 lokasi. Sedangkan Kabupaten yang tidak termasuk dalam wilayah Komunitas Adat Terpencil adalah Kota Palu dan Kabupaten Buol. Adapun data Komunitas Adat Terpencil diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.7

Data Komunitas Adat Terpencil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (KK)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3	4
1.	BANGGAI	1.117	5.858
2.	BANGGAI KEPULAUAN	231	1.155
3.	BANGGAI LAUT	972	4.860
4.	BUOL	-	-
5.	DONGGALA	1.159	5.795

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (KK)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3	4
6.	KOTA PALU	-	-
7.	MOROWALI	392	1.960
8.	MOROWALI UTARA	1.032	5.160
9.	PARIGI MOUTONG	2.377	11.885
10.	POSO	94	470
11.	SIGI	3.127	14.790
12.	TOJO UNA-UNA	1.157	5.785
13.	TOLI-TOLI	4.814	22.075
TOTAL		16.472	79.793

Sumber : Sebaran Data KAT Kementerian Sosial

f). Akibat Bencana Alam

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota. Sulawesi Tengah mempunyai kondisi geografis yang luas dimana hampir setiap kabupaten mempunyai daerah administratif yang berada di pulau bahkan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai laut merupakan daerah otonom yang terdiri dari pulau-pulau. Kondisi dimaksud ditambah terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadikan kendala pada saat penanganan kejadian bencana. Secara akumulatif, bencana alam yang timbul menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil setiap tahunnya.

Pada bencana alam, Dinas Sosial bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana tugas dan fungsi Dinas Sosial lebih kepada sosialisasi dan pemetaan daerah rawan bencana pada pra bencana sehingga dapat meminimalisir dan mengantisipasi kejadian bencana, ikut serta pada saat bencana berupa penyediaan bantuan logistik dan personil yaitu Taruna Siaga Bencana serta bantuan psikososial berupa pendampingan kepada korban bencana pada pasca bencana. Di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 terjadi bencana alam skala besar di beberapa kabupaten/ kota yang terdampak. Adapun rincian data korban jiwa bencana alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.8
Data Bencana Alam Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020/2021

NO	TANGGAL KEJADIAN	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JENIS BENCANA	DATA KORBAN (PENGUNGSI)		KORBAN JIWA			RUMAH RUSAK			KETERANGAN
						KK	JIWA	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Jum'at 15 Jan 2021	DONGGALA	Sojol	Balukang	Banjir Benda ng	660	2.640	-	-	-	6	-	1	
	Jum'at 15 Jan 2021		Sojol	Balukang II	Banjir Benda ng	11	42	-	-	-	3	-	1	
	Jum'at 15 Jan 2021		Sojol	Bou	Banjir Benda ng	307	1.228	-	-	-	-	-	1	
	Kamis, 18 Feb 2021		Balaesa ng Tanjung	Walandano	Tanah Longs or	34	136	-	-	-	4	-	-	
	Jum'at, 02 Juli 2021		Dampelas	Karya Mukti	Banjir	150	600	-	-	-	2	-	3	
	Jum'at, 02 Juli 2021		Dampelas	Parsan Agung	Banjir	65	260	-	-	-	4	-	1	
	Jum'at, 02 Juli 2021		Dampelas	Budi Mukti	Banjir	63	252	-	-	-	-	-	1	
2	Selasa, 04 Mei 2020	MOROWALI	Bungku Tengah	Mendui	Banjir	10	31	-	-	-	10	-	-	
	Selasa, 03 Juni 2021		Bungku Selatan	Padabele	Putting Beliung	3	11	-	-	-	2	-	1	
	Senin, 07 Juli 2020		Bungku Barat	Topogaro	Banjir	5	18	-	-	-	5	-	-	
	Senin, 07 Juli 2020		Bungku Barat	Wosu	Banjir	50	198	-	-	-	-	-	-	
	kamis, 16 Juli 2020		Bahodopi	Dampala	Banjir	125	389	-	-	-	25	-	8	
	kamis, 16 Juli 2021		Bahodopi	Lele	Banjir	73	223	-	-	-	18	-	4	
	Kamis, 06 Agust 2020		Bungku Tengah	Bahontobun gku	Perge seran Tanah (Likuif kasi)	1	5	-	-	-	-	-	1	
	Minggu , 14 Sep 2020		Bungku Tengah	Bente	Banjir	15	67	-	-	-	-	-	-	
	Kamis, 22 Okt 2020		Bungku Barat	Bahoea Reko-reko	Banjir	8	26	-	-	-	6	-	2	
3	14-Jul-2020	PALU	Palu Selatan	Birobuli Selatan	Banjir	10	41	-	-	-	10	-	-	

NO	TANGGAL KEJADIAN	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JENIS BENCANA	DATA KORBAN (PENGUNGSI)		KORBAN JIWA			RUMAH RUSAK			KETERANGAN
						KK	JIWA	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
	14-Jul-2020		Palu Selatan	Birobuli Utara	Banjir	9	20	-	-	-	9	-	-	
	14-Jul-2020		Palu Selatan	Petoba	Banjir	40	225	-	-	-	40	-	-	
	14-Sep-2020		Palu Barat	Baru	Banjir	27	135	-	-	-	27	-	-	
	14-Sep-2020		Mantikulore	Tanahmodi	Banjir	4	16	-	-	-	4	-	-	
	9-Mar-2021		Tatanga	Nunu	Banjir	19	83	-	-	-	12	-	-	
	9-Mar-2021		Tatanga	Boyouge	Banjir	4	15	-	-	-	4	-	-	
	6-Apr-2021		Tawaeli	Baiya	Banjir	23	84		-	-	13	-	-	
4	4-Apr-2021	TOJO UNA-UNA	Ampana Kota	Ampana dan Maloton	Banjir	6	20	-	-	-	7	-	-	
	27-Agu-2021		Tojo Una-Una	Tojo Una=Una	Gempa Bumi	1040	-	-	-	1	22	-	10	
5	23-Jul-2021	BUOL	Momunu	Wakat	Banjir	-	179	-	-	-	-	-	-	
6	29-Agu-2021	SIGI	Dolo Selatan	Rogo	Banjir bandang									
7	28-Agu-2021	TOLITOLI	Ogodede	Bambalaga	Banjir bandang									Bantuan blm ada dan bencana masih terjadi
Jumlah						2762	6944	0	0	1	233	0	34	

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

Bencana alam yang terjadi mengakibatkan banyaknya korban jiwa baik yang mengalami luka ringan maupun berat bahkan sampai kematian. Dalam hal ini bencana alam tersebut merupakan kondisi yang tidak dapat diprediksi sehingga program dan kegiatan pra bencana harus lebih digalakkan sebagai upaya preventif meminimalisir peningkatan jumlah korban bencana.

g). Akibat Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan bencana (yang disebabkan oleh ulah manusia (*man made disasters*) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan sekelompok masyarakat.

Guna menghindari dampak negatif yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi, maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh. Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkan.

Berbagai konflik dan kerusuhan sosial beberapa tahun terakhir cenderung terus meningkat, terutama yang perlu diwaspadai adalah ancaman konflik horisontal seperti perkelahian antar desa serta ancaman konflik yang disebabkan terorisme. Daerah yang berpotensi besar terhadap konflik horisontal sesuai kajian pemetaan adalah Kabupaten Poso, Buol, Sigi dan Kota Palu. Hal ini merupakan ancaman serius bagi Provinsi Sulawesi Tengah dan secara umum keutuhan bangsa. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial. Adapun rincian data korban jiwa bencana sosial pada tahun 2021 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.9
Data Kejadian Bencana Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	KORBAN MENINGGAL (Jiwa)	JUMLAH KERUSAKAN (Rumah)	JUMLAH PENGUNGSI (JIWA)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BANGGAI	Kebakaran	8		8	12	Data Tidak lengkap
2.	BANGGAI KEPULAUAN	Kebakaran	38	4	33	113	Rusak Total 33 Rumah Rusak Berat 3 Rumah Rusak Ringan 2 Rumah
3.	BANGGAI LAUT	Kebakaran	4		4	13	Rusak Berat 2 Rumah Rusak Ringan 2 Rumah
4.	BUOL	Kebakaran	4		4	15	Rusak Total 3 Rumah Rusak Sedang 1 Rumah

NO	KABUPATEN/ KOTA	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	KORBAN MENINGGAL (Jiwa)	JUMLAH KERUSAKAN (Rumah)	JUMLAH PENGUNGSI (JIWA)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	DONGGALA	Kebakaran	9	1	12	49	Rusak Total 9 Rumah Rusak Berat 3 Rumah
6.	KOTA PALU	Kebakaran	16		16	167	Rusak Total 14 Rumah Rusak Berat 1 Rumah Rusak Ringan 1 Rumah
7.	MOROWALI	Kebakaran	2		2	8	Rusak Total 2 Rumah
8.	MOROWALI UTARA	Kebakaran	3		6	19	Rusak Total 4 Rumah Rusak Ringan 2 Rumah
9.	PARIGI MOUTONG	Kebakaran	8		20	82	Rusak Total 18 Rumah Rusak Berat 2 Rumah
10.	POSO	Kebakaran	7		7	34	Rusak Total 7 Rumah
11.	SIGI	Kebakaran	12		19	21	Data Tidak lengkap
12.	TOJO UNA- UNA	Kebakaran	30		30	79	Rusak Total 1 Rumah Rusak Berat 29 Rumah
13.	TOLI-TOLI	Kebakaran	11		11		Data Tidak lengkap
TOTAL			152	5	172	612	

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

Disamping permasalahan sosial yang harus ditangani dan dikurangi populasinya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah juga mempunyai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang harus ditingkatkan dan dikembangkan, meliputi:

a) Pekerja Sosial Masyarakat

Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial dengan kriteria sebagai berikut:

- WNI
- Laki-laki atau perempuan usia 18 tahun ke atas
- Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945

- Bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum
- Berkelakuan baik
- Sehat jasmani dan rohani
- Telah mengikuti pelatihan PSM
- Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM

Pekerja Sosial Masyarakat merupakan garda terdepan yang mendukung kontinuitas pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Hal tersebut disebabkan karena pekerja sosial masyarakat merupakan seseorang yang berdomisili pada suatu wilayah serta memegang peranan untuk menyampaikan informasi serta berbaur berusaha menyelesaikan permasalahan dan gejolak yang terjadi di lingkungannya atas pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Idealnya setiap desa memiliki seorang pekerja sosial masyarakat. Namun, kondisi di Sulawesi Tengah dengan jumlah kecamatan 171 dan jumlah desa 1049, pekerja sosial masyarakat yang ada sudah mencapai 4.408 orang namun penyebarannya tidak merata. Oleh karena itu, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk menggerakkan dan mendorong Dinas Sosial Kabupaten / Kota untuk mencari dan merekrut masyarakat yang berkompeten menjadi pekerja sosial masyarakat. Untuk mempertahankan kualitas dan kompetensi pekerja sosial masyarakat serta menjaga kontinuitas perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial maka Dinas Sosial melaksanakan bimbingan teknis bagi pekerja sosial masyarakat yang mana pada tahun 2013 dan 2014 jumlah PSM sebanyak 1.041 orang namun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan kembali sebanyak 1.042 orang dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan dengan jumlah 1.849 orang. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah PSM mengalami penurunan sebanyak 1.847 orang. Adapun data PSM pada tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.10

Data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PSM
1	2	3	4	5
1.	BANGGAI	14	33	113

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PSM
1	2	3	4	5
2.	BANGGAI KEPULAUAN	5	54	160
3.	BANGGAI LAUT	1	6	6
4.	BUOL	1	11	27
5.	DONGGALA	6	22	26
6.	KOTA PALU	8	44	119
7.	MOROWALI	1	3	3
8.	MOROWALI UTARA	2	11	12
9.	PARIGI MOUTONG	4	42	68
10.	POSO	8	69	76
11.	SIGI	11	91	104
12.	TOJO UNA-UNA	1	9	9
13.	TOLI-TOLI	8	70	105
TOTAL				828

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

b) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan *seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial*. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah *mereka yang berlatarbelakang pendidikan pekerjaan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial yang memiliki pengalaman pelayanan sosial minimal 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti pelatihan di bidang kesejahteraan sosial*. Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKS adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut Dra. Umi Ratih Santoso dalam bukunya menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah

seseorang yang atas dasar sukarela mengabdikan dirinya di bidang usaha kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput.

Dari definisi di atas bisa di simpulkan bahwa tenaga kesejahteraan sosial kecamatan adalah seorang yang memiliki kualitas pendidikan non pekerja sosial yang memiliki pengalaman dalam bidang kesejahteraan sosial dan dididik serta dilatih dalam bidang kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK ini berada pada wilayah kecamatan. Pada saat ini, TKSK mempunyai tugas selain menyampaikan informasi pembangunan Kesejahteraan sosial, mendata dan memperbaharui secara periodik data penyandang masalah kesejahteraan sosial, bekerjasama dengan pemerintah terutama aparat pemerintah kecamatan dan desa mensukseskan pelaksanaan pembangunan seperti pendampingan pelaksanaan distribusi program beras miskin atau yang dikenal dengan Program Raskin. Jumlah TKSK di Sulawesi Tengah terus berkembang dari hanya 99 orang sampai dengan tahun 2013 menjadi 171 orang pada tahun 2014. Sehingga kondisi ideal satu kecamatan satu tenaga kesejahteraan sosial telah terpenuhi. Tahun 2015 sampai dengan 2016, jumlah TKSK belum mengalami peningkatan tetap 171 orang dan pada tahun 2017 telah mengalami kenaikan jumlah TKSK menjadi 176 orang, namun menyesuaikan dengan peningkatan tugas dan tanggung jawab TKSK perlu dipertimbangkan untuk penambahan kuantitas sehingga dapat lebih mengoptimalkan kinerja TKSK di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini pada tahun 2018 jumlah TKSK yaitu sebanyak 175 orang. Adapun data TKSK pada tahun 2021 di uraikan sebagai berikut :

Tabel 1.11
Data Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TKSK
1	2	3
1.	BANGGAI	23
2.	BANGGAI KEPULAUAN	12
3.	BANGGAI LAUT	7
4.	BUOL	11
5.	DONGGALA	16

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TKSK
1	2	3
6.	KOTA PALU	8
7.	MOROWALI	9
8.	MOROWALI UTARA	10
9.	PARIGI MOUTONG	23
10.	POSO	19
11.	SIGI	15
12.	TOJO UNA-UNA	12
13.	TOLI-TOLI	10
TOTAL		175

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

c) Taruna Siaga Bencana

Taruna Siaga Bencana atau yang dikenal dengan TAGANA pada hakekatnya merupakan berhimpunnya seluruh kekuatan komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda. Kata-kata Taruna memiliki arti generasi muda, dan Kata Siaga memiliki arti segala upaya kesiapsiagaan dalam kondisi apapun dan Kata Bencana adalah tantangan dan masalah yang harus dihadapi dalam kiprah dan pengabdian pada kemanusiaan TAGANA juga tetap pada kaidah kaidah management bencana berbasis masyarakat. TAGANA bukan hanya berperan pada saat terjadi bencana tetapi juga pada saat pra bencana maupun pasca bencana. Jumlah personil TAGANA di Sulawesi Tengah semakin hari semakin berkembang seiring kebutuhan personil pada saat terjadi bencana. Pada saat ini jumlah personil TAGANA yang mendapatkan tali asih sebanyak 567 orang dan tersebar di seluruh kabupaten/ kota. Adapun data Tagana pada tahun 2021 di uraikan sebagai berikut :

Tabel 1.12
Data Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TAGANA
1	2	3
1.	BANGGAI	26
2.	BANGGAI KEPULAUAN	25
3.	BANGGAI LAUT	28
4.	BUOL	33
5.	DONGGALA	17
6.	KOTA PALU	114
7.	MOROWALI	25
8.	MOROWALI UTARA	26
9.	PARIGI MOUTONG	97
10.	POSO	17
11.	SIGI	75
12.	TOJO UNA-UNA	50
13.	TOLI-TOLI	34
TOTAL		567

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

d) Tenaga Pelopor Perdamaian

Khusus untuk penanganan bencana sosial Kementerian Sosial membentuk Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial baru yang di sebut dengan Tenaga Pelopor Perdamaian. Tenaga pelopor perdamaian merupakan suatu potensi sumber sosial yang berfungsi meredam gejolak konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal yang rentan terjadi di tengah masyarakat, tugas mereka untuk mengatasi masalah sosial sebagai bantalan sosial untuk meredam konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun data Tenaga Pelopor Perdamaian pada tahun 2021 di uraikan sebagai berikut :

Tabel 1.13
Data Tenaga Pelopor Perdamaian
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TENAGA PELOPOR
----	----------------	-----------------------

1	2	3
1.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	37
2.	BANGGAI	8
3.	BANGGAI KEPULAUAN	6
4.	BANGGAI LAUT	8
5.	BUOL	7
6.	DONGGALA	6
7.	KOTA PALU	19
8.	MOROWALI	6
9.	MOROWALI UTARA	6
10.	PARIGI MOUTONG	7
11.	POSO	13
12.	SIGI	10
13.	TOJO UNA-UNA	7
14.	TOLI-TOLI	7
TOTAL		147

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

e) Lembaga Kesejahteraan Sosial

Merupakan Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dengan kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas
- Mempunyai pengurus dan program kerja
- Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum
- Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesos

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial harus mempunyai sumberdaya berikut ini sebagai standar menuju akreditasi yaitu:

- SUMBER DAYA MANUSIA
- SARANA DAN PRASARANA
- SUMBER PENDANAAN, SERTA

- STANDAR LKS (YG SUDAH DITETAPKAN MELALUI PERMENSOS NOMOR 30/HUK/2011)

Sesuai dengan perkembangannya, jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial atau yang dikenal dengan LKS terus meningkat. Pada Tahun 2014, jumlah LKS di Sulawesi Tengah sebanyak 141 LKS tersebar di seluruh kabupaten dan kota dan jumlah LKS meningkat menjadi 145 pada tahun 2015, dan ditahun 2016 tidak terdapat peningkatan jumlah LKS. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan kembali dengan jumlah LKS menjadi 162, kemudian pada tahun 2018 tidak mengalami peningkatan jumlah LKS. Meskipun demikian, ada atau tidaknya perkembangan kuantitas tersebut belum diimbangi dengan perkembangan kualitas terutama pengelolaan manajemen LKS yang sampai dengan saat ini belum mempunyai Standar Operasional Prosedur atau SOP yang baku. Manajemen pengelolaan LKS baru sebatas manajemen turun temurun secara tradisional. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan sehingga pola pengelolaan manajemen LKS lebih tertib dan terarah dan dapat mencegah serta meminimalisir penyimpangan. Untuk lebih mendorong terwujudnya LKS professional perlu dibuat Peraturan Daerah ataupun Peraturan Gubernur yang menjabarkan *reward* bagi LKS berprestasi dan mampu mempertahankan mutu dan kualitasnya serta *punishment* bagi LKS yang tidak mampu membuka diri terhadap dinamika perubahan dan berkembang sehingga LKS mampu menjadi mitra pemerintah dalam mensukseskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah. Adapun data LKS pada tahun 2021 di uraikan sebagai berikut :

Tabel 1.14
Data LKS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LKS	JUMLAH LKS TERAKREDITASI
1	2	3	4
1.	BANGGAI	17	13
2.	BANGGAI KEPULAUAN	3	1
3.	BANGGAI LAUT	3	1
4.	BUOL	7	5

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LKS	JUMLAH LKS TERAKREDITASI
1	2	3	4
5.	DONGGALA	8	3
6.	KOTA PALU	65	39
7.	MOROWALI	6	4
8.	MOROWALI UTARA	3	2
9.	PARIGI MOUTONG	8	8
10.	POSO	24	15
11.	SIGI	17	10
12.	TOJO UNA-UNA	1	-
13.	TOLI-TOLI	9	4
TOTAL		171	105

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

f) Dunia Usaha

Dalam mensukseskan pembangunan khususnya bidang kesejahteraan sosial, maka pemerintah sangat mengharapkan partisipasi *stakeholders* termasuk diantaranya kalangan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* atau CSR. Implementasi CSR selama ini khususnya di Sulawesi Tengah memang masih berfokus pada urusan pendidikan dan kesehatan dan belum menyentuh pada urusan sosial terutama pengentasan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk menggerakkan Dunia usaha untuk lebih peduli terhadap permasalahan sosial maka Dinas Sosial melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku dunia usaha yang mempunyai program CSR. Disamping itu, Dinas Sosial juga menginisiasi pembentukan 1 forum CSR tingkat provinsi yang akan mendorong dan menggerakkan pelaku dunia usaha di Sulawesi Tengah untuk melaksanakan program CSR dengan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial.

g) Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan dan

terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Rumusan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
2. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusaha menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna.
4. Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Karenanya setiap desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya sendiri.
5. Gerakannya di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial berarti bahwa semua upaya program dan kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya

Karang Taruna diharapkan menjadi embrio munculnya pekerja-pekerja sosial masyarakat yang berkompeten dan berkualitas secara aktif mendukung pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas karang taruna di Sulawesi Tengah khususnya, Dinas Sosial melaksanakan bimbingan teknis bagi pengurus Karang Taruna, pemberian bantuan stimulant pengembangan usaha menuju kemandirian organisasi Karang Taruna dan Bulan Bhakti Karang Taruna sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan Karang Taruna se Sulawesi Tengah pada pembangunan kesejahteraan sosial serta menjadi ajang tukar pengalaman pengelolaan manajemen organisasi.

Namun, kondisi tersebut belum didukung oleh alokasi anggaran yang memadai sehingga setiap tahunnya. Pada tahun 2010 telah dilakukan pembinaan bagi 36 Karang Taruna, dan tahun 2011 sampai dengan 2012 dilakukan bimbingan kepada 40 Karang Taruna, pada tahun 2013, yang menerima bimbingan dan pembinaan sebanyak 44 Karang Taruna. Namun, pada tahun anggaran 2014, pembinaan tersebut hanya mampu dialokasikan bagi 40 Karang Taruna, ditahun 2015 mengalami penurunan hanya mampu dialokasikan bagi 22 Karang Taruna, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali sebanyak 37 Karang Taruna dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 46 Karang Taruna yang menerima bimbingan dan pembinaan serta yang menerima bantuan sosial UEP sebanyak 6 Karang Taruna. Adapun Data Populasi jumlah Karang Taruna pada tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.15
Data Populasi Karang Taruna
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	KARANG TARUNA TERDATA	KARANG TARUNA TIDAK TERDATA	JUMLAH KARANG TARUNA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Kota Palu	41	0	41	
2	Sigi	23	0	23	
3	Donggala	73	1	74	
4	Parigi Moutong	103	0	103	
5	Toli toli	17	0	17	
6	Buol	59	0	59	
7	Poso	44	0	44	
8	Tojo Una Una	25	0	25	
9	Morowali	47	0	47	
10	Moruwali Utara	5	7	12	
11	Banggai	97	248	345	
12	Banggai Laut	6	0	6	
13	Banggai Kepulauan	-	-	-	
JUMLAH		540	256	796	

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (diolah)

h) Wahana Kesejahteraan sosial Berbasis Masyarakat

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah suatu wahana/wadah/tempat masyarakat melaksanakan upaya atau usaha kesejahteraan sosial bagi warga masyarakatnya.

Pengelola WKSBM terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok sosial (Keperangkatan Pelayanan Sosial / KPS) dan tokoh-tokoh masyarakat.

Adapun tujuan dari WKSBM adalah agar masyarakat mampu mengentaskan sendiri warga masyarakatnya yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Sosialisasi/penjelasan WKSBM pada masyarakat (Ketua RT/RW/Kadus).
2. Pertemuan dengan perwakilan KPS dan tokoh-tokoh masyarakat.
3. Pembentukan kepengelolaan / kepengurusan.
4. Identifikasi PMKS dan PSKS.
5. Sosialisasi WKSBM pada masyarakat (melalui pertemuan ditiap-tiap RT).
6. Penggalan potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
7. Penyaluran dan memanfaatkan PSKS bagi PMKS.
8. Merujuk PMKS yang tidak mapu ditangani WKSBM ke Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS).

Jumlah masyarakat yang tergabung dalam WKSBM di Sulawesi Tengah yang telah dibina, dibimbing serta diberdayakan sebanyak 23 orang pada tahun 2017 sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Begitu pula pada tahun 2018, jumlah masyarakat yang tergabung dalam WKSBM ialah sebanyak 23 orang.

1.2.2 PERMASALAHAN UTAMA

Tantangan kedepan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tantangan eksternal yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial-ekonomi sebagian besar masyarakat, implikasi konflik horizontal yang belum pulih, masih rendahnya daya dorong perekonomian, tingginya disparitas kesejahteraan sosial antar-Daerah otonom, dan keterbatasan penyediaan infrastruktur sosial, serta

populasi PMKS yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya, sedangkan untuk Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dari Organisasi Sosial yang dibina sampai saat ini belum ada satupun yang terakreditasi, padahal akreditasi menjadi syarat utama untuk dapat menerima bantuan dari Kementerian (APBN) maupun APBD. Kemudian PSKS lainnya seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan masih perlu untuk lebih ditingkatkan kapasitas sehingga kualitas yang bersangkutan dapat menjawab dinamika permasalahan/isu yang telah berubah setiap tahun.

Tantangan internal yang dihadapi adalah belum meratanya penyebaran SDM pembangunan kesejahteraan sosial sebagai dampak dari kebijakan otonomi daerah, belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dan daya dukung anggaran terutama alokasi APBD yang secara rasio masih jauh dari kebutuhan ideal pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan masalah PMKS.

1.3 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut di atas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
4. Pelaksanaan tugas lain di bidang sosial yang diberikan oleh Gubernur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan Program dan Evaluasi
 - b. Subbagian Keuangan dan Asset
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau - pulau
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, KAT, dan Kelembagaan Sosial
 - c. Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan PSDS
5. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, KPO dan Napza
 - c. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
6. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - c. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial dan Keluarga
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dibantu juga oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai berikut :

1. UPTD Panti Sosial Anak yang terletak di Kota Palu.
2. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial yang terletak di Kota Palu.
3. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha "Madago" yang terletak di Kabupaten Poso.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berjumlah 166 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 1.16
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat / Golongan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	Perangkat Daerah OPD	Pangkat / Golongan																Jumlah
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	
1	2	3																4
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	1	-	5	11	21	9	16	15	4	2	24	5	-	-	-	-	113
2	UPT Pantis Sosial Anak	-	-	-	1	5	3	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	17
3	UPT Pantis Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	-	1	2	-	1	4	-	-	7	2	-	-	-	-	17
4	UPT Pantis Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	-	-	3	2	2	2	5	3	2	-	-	-	-	-	19
Total																		166

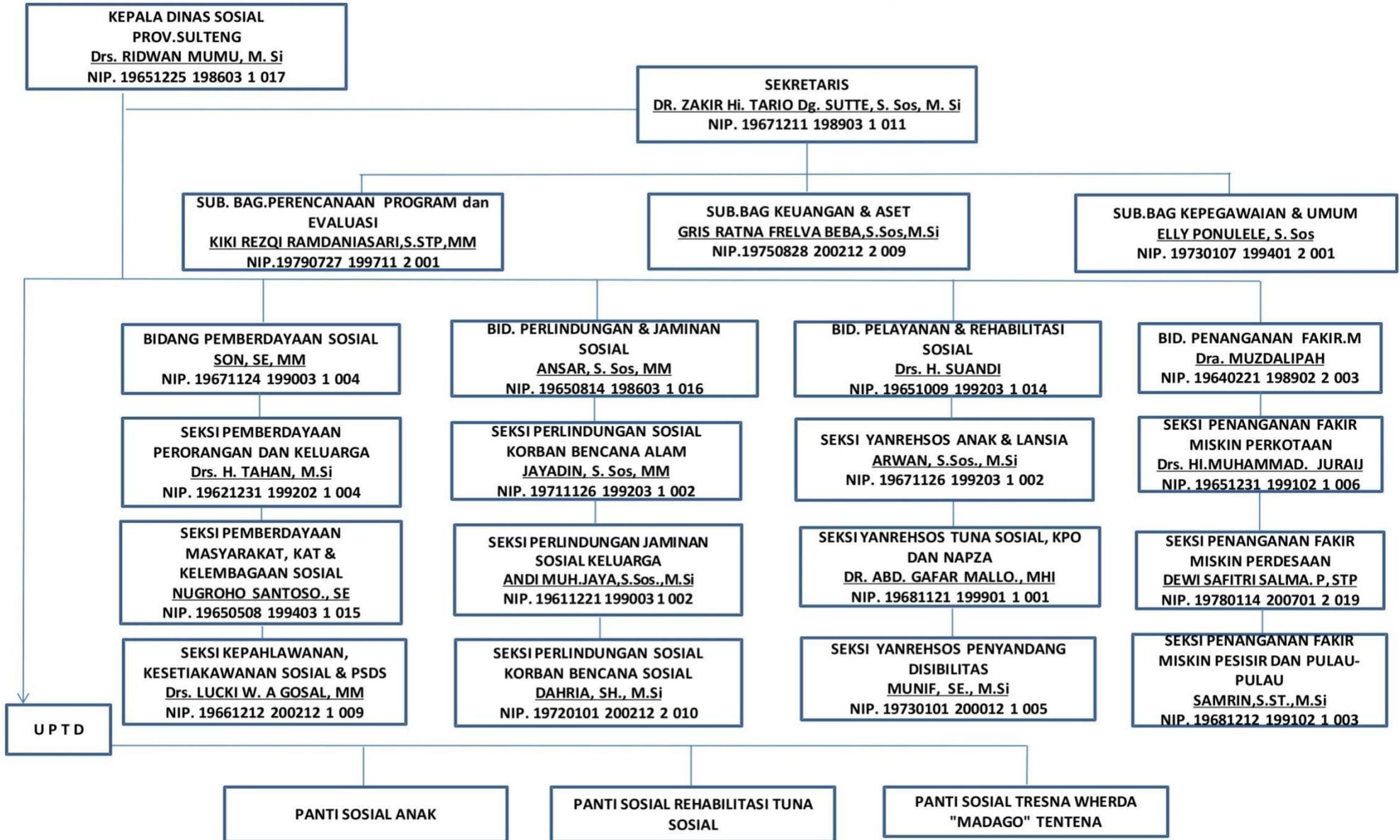
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Tabel 1.17
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	Perangkat Daerah OPD	Kualifikasi Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	DI	SMA/SLTA	SMP/SLTP	SD	
1	2	3										4
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	2	17	48	2	4	-	-	40	-		113
2	UPT Pantis Sosial Anak	-	2	10	1	-	-	-	4	-		17
3	UPT Pantis Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	6	-	-	-	-	11	-		17
4	UPT Pantis Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	7	-	-	-	-	12	-		19
Total												166

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROV. SULTENG



1.4 SISTEMATIKA LAKIP DINSOS 2021

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi bagi peningkatan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum mengenai organisasi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi pada tahun 2021 serta tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi.

Bab II :Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan secara ringkas dan jelas visi, misi sasaran dan tujuan, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja pada tahun 2021.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja,

- a. Capaian Kinerja, menyajikan secara utuh perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021, perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016-2021 dan perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dan target awal RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup, menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan Daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan Otonomi Daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa Daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan Daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-OPD).

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renstra OPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1.1 VISI DAN MISI

VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ialah:

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Sulawesi Tengah Kurang Mampu dan Rentan Menuju Kesejahteraan Sosial”

Makna pokok yang terkandung dalam Visi di atas adalah :

Kemandirian Masyarakat, merupakan kemampuan untuk melakukan pengembangan kapasitas masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam pembangunan. Kemandirian merupakan tujuan akhir penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.

Masyarakat Sulawesi Tengah Kurang Mampu dan Rentan, merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang beresiko dan memiliki masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri atas :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)
18. Korban Trafficking
19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban bencana sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin (FM)
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Kesejahteraan Sosial, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra Dinas Sosial tahun 2016-2021 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Hal ini juga memberi makna bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi tata kehidupan sosial yang sejahtera, yang memungkinkan setiap orang, kelompok atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani dengan sebaik-baiknya.

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan Misi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang memuat sasaran-sasaran yang harus dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan rumusan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Melanjutkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial terhadap masyarakat;

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Secara Operasional berdasarkan Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi tengah periode tahun 2016-2021 adalah :

Tujuan 1 :

- Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran 1 :

- Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial .

Tujuan 2 :

- Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial .

Sasaran 2 :

- Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial) .

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULASI PERHITUNGAN
1		2		3
Sasaran 1 :				
1.	Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial .	1.	Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir dan Pulau-Pulau yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	- Jumlah keluarga miskin di Perdesaan, Perkotaan dan Pesisir dan Pulau-Pulau yang menerima bantuan modal usaha berkelompok.
Sasaran 2 :				
2.	Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial).	2.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSM, TKSK, ORSOS, Karang Taruna, Penyuluh Sosial dan Masyarakat) yang meningkatkan pengetahuannya, serta pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejuangan dan kepirintisan.	- Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mengikuti bimbingan manajemen, sosial dan workshop. - Jumlah Family Care Unit yang terbentuk. - Jumlah kegiatan talkshow Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Barang (PUB) yang diselenggarakan. - Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional kepahlawanan yang dilaksanakan.
		3.	Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, relawan yang meningkat pengetahuannya serta Kabupaten yang mendukung pelaksanaan PKH.	- Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik. - Jumlah relawan yang meningkat keterampilannya dalam penanganan bencana dan orang terlantar yang di pulangkan. - Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja peningkatan kualitas pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH).
		4.	Jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar, Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO), penyandang disabilitas, dan Tuna Sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	- Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan sosial. - Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan sosial. - Jumlah korban tindak kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN
1		2	3
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penyandang disabilitas yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial. - Jumlah penyandang Eks NAPZA dan Tuna Sosial (Waria, WTS dan Eks Napi) yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial. - Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial. - Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial. - Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.	1 Persentase keluarga fakir miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	100%
2.	Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial dan jaminan sosial.	1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang profesional.	100%
		2 Persentase penanganan korban bencana dan orang terlantar.	100%
		3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya.	100%
		4 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya.	100%
		5 Persentase korban tindak kekerasan dan perdagangan orang yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya..	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		6 Persentase penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	100%
		7 Persentase tuna sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	100%

• **Sumber Dana APBD**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET.
A.	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	26.705.962.082	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.097.234.497	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	241.770.000	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.012.924.784	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.415.500	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.474.000	
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	381.492.500	
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.762.713	
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.395.000	
II.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	436.692.250	
	1 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.850.750	
	2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	408.841.500	
III.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5.000.000	
	1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	5.000.000	
IV.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.689.165.300	
	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	128.415.000	
	2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	213.964.000	
	3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.149.230.000	
	4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	74.498.500	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET.
5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	123.057.800	
V.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.974.788.600	
1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	20.000.000	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.954.788.600	
VI.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	291.599.800	
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	291.599.800	
VII.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	211.481.635	
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	111.481.635	
B.	UPT. PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA "MADAGO" TENTENA	960.670.228	
I.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	960.670.228	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant	960.670.228	
C.	UPT. PANTI SOSIAL ANAK	324.801.850	
I.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	324.801.850	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	324.801.850	
D.	UPT. PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL	302.911.590	
I.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	302.911.590	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	302.911.590	
	TOTAL PAGU	28.294.345.750	

- **Sumber Dana APBN**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE SATKER	PAGU ANGGARAN	KET
I.	Program Dukungan Manajemen	180014	196.096.000	
II.	Pogram Perlindungan Sosial	189013	419.902.000	
III.	Pogram Perlindungan Sosial	189015	2.224.202.000	
IV.	Pogram Perlindungan Sosial	418969	2.213.350.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE SATKER	PAGU ANGGARAN	KET
V.	Pogram Perlindungan Sosial	418841	179.090.000	
	TOTAL PAGU		5.232.640.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang berisi informasi mengenai capaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021. Tahun 2021 ini juga merupakan tahun transisi dimana sebagai pijakan kuat menuju keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah menjelang tahun terakhir periode 2016-2021.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Salah satu cara untuk melihat capaian kinerja organisasi adalah melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Gubernur Sulawesi Tengah dengan realisasi kinerja yang telah dicapai organisasi serta dilakukan analisis terhadap penyebab lambatnya dan atau tidak tercapainya target. Pengukuran ini dilaksanakan secara periodik setiap triwulan agar dapat ditemukan solusi dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja sebagaimana terlampir.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama yaitu menurunkan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatkan serta mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui 2 sumber dana yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2021 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2021

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Sasaran I : Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir dan Pulau-Pulau yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 	<p style="text-align: center;">262 KK 1048 Jiwa</p>	<p style="text-align: center;">302 KK 1208 Jiwa</p>	115
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang menerima bantuan modal usaha berkelompok. 2. Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang menerima bantuan modal usaha berkelompok. 3. Jumlah keluarga miskin di pesisir dan pulau - pulau yang menerima bantuan modal usaha berkelompok. 	<p style="text-align: center;">262 KK 1048 Jiwa</p>	<p style="text-align: center;">302 KK 1208 Jiwa</p>	115
2.	Sasaran II : Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSM, TKSK, ORSOS, Karang Taruna, Penyuluh Sosial dan Masyarakat) yang meningkat pengetahuannya, serta pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejujuran dan kepirintisan 	<p style="text-align: center;">20 TKSK, 191 KT, 14 Orsos, 12 PSM, 8 Keg</p>	<p style="text-align: center;">24 TKSK, 6 KT, 33 Orsos, 30 PSM, 4 Keg</p>	39
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Jumlah pengurus Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mengikuti Workshop. 	20 TKSK	24	120

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		5. Jumlah pengurus Karang Taruna yang mengikuti bimbingan manajemen.	191 KT	6 KT	3,14
		6. Jumlah pengurus Organisasi Sosial yang mengikuti bimbingan manajemen.	14 Orsos	33	236
		7. Jumlah pengurus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mengikuti bimbingan sosial.	12 PSM	30 PSM	250
		8. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan KAT yang terlaksana.	1 Keg	-	-
		9. Jumlah kegiatan talkshow Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Barang (PUB) yang diselenggarakan	2 Keg	2 Keg	100
		10. Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional kepahlawanan yang dilaksanakan	5 Keg	2 Keg	40
		- Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, relawan yang meningkat pengetahuannya serta Kabupaten yang mendukung pelaksanaan PKH	1536 Org, 1 Lap	2850 Org, 1 Lap	185
		11. Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik.	1500 Org	2816 Org	187

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		12. Jumlah relawan yang meningkat keterampilannya dalam penanganan bencana dan orang terlantar yang di pulangkan.	36 Org	34 Org	94
		13. Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja peningkatan kualitas pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH).	1 Lap	1 Lap	100
		- Jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar, Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO), penyandang disabilitas, dan Tuna Sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	787 Org	1020 Org	130
		14. Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan sosial.	525 Org	698 Org	133
		15. Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan sosial.	33 Org	180 Org	545
		16. Jumlah korban tindak kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial.	22 Org	15 Org	68
		17. Jumlah penyandang disabilitas yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial.	101 Org	36 Org	35,6
		18. Jumlah penyandang Eks NAPZA dan Tuna Soisal (waria,WTS dan Eks Napi) yang mendapat kan bimbingan dan bantuan	8 Org	30 Org	375

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		sosial.			
		19. Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial.	18 Org	25 Org	139
		20. Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial.	30 Org	-	-
		21. Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan dan bantuan social	50 Org	48 Org	96

Sumber : Dinas Sosial Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2021(diolah kembali)

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dari sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	Diatas 91%	13	Sangat Baik
2	76% sampai dengan 90%	-	-
3	66% sampai dengan 75%	1	Sedang
4	51% sampai dengan 65%	-	-
5	Dibawah 50%	5	Sangat Rendah
	JUMLAH		

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	91<	76< 90	66< 75	51≤ 65	≤50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sasaran I :									

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	91<	76< 90	66< 75	51≤ 65	≤50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.	- Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir dan Pulau-Pulau yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	262 KK 1048 Jiwa	302 KK 1208 Jiwa	115	√				
		1. Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang menerima bantuan modal usaha berkelompok. 2. Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang menerima bantuan modal usaha berkelompok. 3. Jumlah keluarga miskin di pesisir dan pulau - pulau yang menerima bantuan modal usaha berkelompok.	262 KK 1048 Jiwa	302 KK 1208 Jiwa	115	√				

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	91<	76< 90	66< 75	51≤ 65	≤50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Sasaran II : Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial)	- Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSM, TKSK, ORSOS, Karang Taruna, Penyuluh Sosial dan Masyarakat) yang meningkat pengetahuannya, serta penguasaan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejuangan dan kepirintisan	20 TKSK, 191 KT, 14 Orsos, 12 PSM, 8 Keg	24 TKSK, 6 KT, 33 Orsos, 30 PSM, 4 Keg	39					√
		4. Jumlah pengurus Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mengikuti Workshop.	20 TKSK	24 TKSK	120	√				
		5. Jumlah pengurus Karang Taruna yang mengikuti bimbingan manajemen..	191 KT	6 KT	3,14					√

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	91<	76< 90	66< 75	51≤ 65	≤50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6. Jumlah pengurus Organisasi Sosial yang mengikuti bimbingan manajemen	14 Orsos	33 Orsos	236	√				
		7. Jumlah pengurus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mengikuti bimbingan sosial.	12 PSM	30 PSM	250	√				
		8. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan KAT yang terlaksana	1 Keg	- Keg	-					√
		9. Jumlah kegiatan talkshow Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Barang (PUB) yang diselenggarakan	2 Keg	2 Keg	100	√				
		10. Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional kepahlawanan yang dilaksanakan	5 Keg	2 Keg	40					√

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	91<	76< 90	66< 75	51≤ 65	≤50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, relawan yang meningkat pengetahuannya serta Kabupaten yang mendukung pelaksanaan PKH.	1536 Org	2850 Org	185	√				
		11. Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik.	1500 Org	2816 Org	187	√				
		12. Jumlah relawan yang meningkat keterampilannya dalam penanganan bencana dan orang terlantar yang di pulangkan.	36 Org	34 Org	94	√				
		13. Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja peningkatan kualitas pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH).	1 Lap	1 Lap	100	√				

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	91<	76< 90	66< 75	51≤ 65	≤50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar, Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO), penyandang disabilitas, dan Tuna Sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	787 Org	1020 Org	130	√				
		14. Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan sosial.	525 Org	698 Org	133	√				
		15. Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan sosial.	33 Org	180 Org	545	√				
		16. Jumlah korban tindak kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial.	22 Org	15 Org	68			√		
		17. Jumlah penyandang disabilitas yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial.	101 Org	36 Org	35,6					√

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	91<	76< 90	66< 75	51≤ 65	≤50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18. Jumlah penyandang Eks NAPZA dan Tuna Soisal (waria,WTS dan Eks Napi) yang mendapat kan bimbingan dan bantuan sosial.	8 Org	30 Org	375	√				
		19. Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial.	18 Org	25 Org	139	√				
		20. Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial.	30 Org	- Org	-					√
		21. Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial.	50 Org	48 Org	96	√				

Sumber : Dinas Sosial Prov. Sulteng 2021 (diolah kembali).

Data capaian di atas menggambarkan bahwa dari 21 indikator kinerja sasaran yang ada terdapat 13 (tiga belas) indikator capaian diatas 91%, kemudian 1 (satu) indikator capaian diantara 66% samapai dengan 75% atau kategori sedang, sedangkan indikator dibawah 50% terdapat 5 (lima) indikator atau kategori sangat rendah. Dengan demikian indikator capaian anggaran tahun 2021 mengalami pencapaian indikator kinerja sasaran yang cukup baik. Hal ini dapat

dilihat dari persentase indikator kinerja sasaran di atas 91% lebih banyak dibandingkan indikator yang berada dibawah 50%.

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Sasaran kesatu yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja Meningkatnya produktif keluarga fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2016 s/d 2021 dari indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir dan Pulau-Pulau yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Tabel 3.5

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	2560 Jiwa	2920 Jiwa	114
2	2017	1680 Jiwa	1680 Jiwa	100
3	2018	1500 Jiwa	1300 Jiwa	87
4	2019	1420 Jiwa	1680 Jiwa	118
5	2020	1032 Jiwa	464 Jiwa	45
6	2021	1048 Jiwa	1208 Jiwa	115

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada triwulan II, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terjadi refocussing / realokasi anggaran yang merubah target kinerja dari 1.048 jiwa menjadi 1208 jiwa, dan terlaksana secara keseluruhan sehingga capaian kinerja menjadi 115%.

2. Sasaran Kedua Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial).

Sasaran kedua yaitu Optimalisasi pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial) dengan lima belas indikator kinerja sasaran , realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2016 s/d 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah pengurus Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mengikuti Workshop.

Tabel 3.6

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	110 Orang	110 Orang	100
2	2017	95 Orang	95 Orang	100
3	2018	118 Orang	111 Orang	94
4	2019	89 Orang	89 Orang	100
5	2020	20 Orang	-	-
6	2021	20 Orang	24 Orang	120

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada triwulan II, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terjadi refocussing / realokasi anggaran yang merubah target kinerja dari 20 jiwa menjadi 24 jiwa, dan terlaksana secara keseluruhan sehingga capaian kinerja menjadi 120%

- 2) Jumlah pengurus Karang Taruna yang mengikuti bimbingan manajemen.

Tabel 3.7

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	37 KT	37 KT	100
2	2017	50 KT	52 KT	104
3	2018	55 KT	213 KT	387
4	2019	28 KT	40 KT	142
5	2020	191 KT	2 KT	1
6	2021	191 KT	6 KT	3,14

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada triwulan II, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terjadi refocussing / realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan Covid - 19 yang mempengaruhi target program / kegiatan yang menyebabkan sangat rendahnya capaian kinerja.

- 3) Jumlah pengurus Organisasi Sosial yang mengikuti bimbingan manajemen.

Tabel 3.8

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	50 Orsos	50 Orsos	100
2	2017	40 Orsos	42 Orsos	105
3	2018	54 Orsos	54 Orsos	100
4	2019	23 Orsos	23 Orsos	100
5	2020	14 Orsos	-	-
6	2021	14 Orsos	33 Orsos	236

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada triwulan II, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terjadi refocussing / realokasi anggaran yang merubah target kinerja dari 14

Orsos menjadi 33 Orsos, dan terlaksana secara keseluruhan sehingga capaian kinerja menjadi 236%

- 4) Jumlah pengurus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mengikuti bimbingan sosial.

Tabel 3.9

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	20 PSM	20 PSM	100
2	2017	35 PSM	35 PSM	100
3	2018	43 PSM	43 PSM	100
4	2019	43 PSM	43 PSM	100
5	2020	12 PSM	12 PSM	100
6	2021	12 PSM	30 PSM	250

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada triwulan II, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terjadi refocussing / realokasi anggaran yang merubah target kinerja dari 12 PSM menjadi 30 PSM, dan terlaksana secara keseluruhan sehingga capaian kinerja menjadi 250%

- 5) Jumlah Family Care Unit yang terbentuk.

Tabel 3.10

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	1 FCU	1 FCU	100
2	2017	1 FCU	1 FCU	100
3	2018	1 FCU	1 FCU	100
4	2019	1 FCU	1 FCU	100
5	2020	-	-	-
6	2021	-	-	-

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada tahun 2021, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tidak mendapatkan alokasi anggaran pada program kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

- 6) Jumlah kegiatan talkshow Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Barang (PUB) yang diselenggarakan.

Tabel 3.11

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	2 Keg	2 Keg	100
2	2017	2 Keg	2 Keg	100
3	2018	2 Keg	2 Keg	100
4	2019	2 Keg	2 Keg	100
5	2020	2 Keg	1 Keg	50
6	2021	2 Keg	2 Keg	100

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

- 7) Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional kepahlawanan yang dilaksanakan.

Tabel 3.12

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	5 Keg	5 Keg	100
2	2017	5 Keg	5 Keg	100
3	2018	5 Keg	5 Keg	100
4	2019	5 Keg	5 Keg	100
5	2020	5 Keg	1 Keg	20
6	2021	5 Keg	2 Keg	40

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada Tahun 2021, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah hanya mendapatkan alokasi anggaran minimal dikarenakan masih dalam masa percepatan penanggulangan pandemi Covid - 19 sehingga untuk kegiatan peringatan hari besar nasional kepahlawanan dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan protokol kesehatan.

- 8) Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik.

Tabel 3.13

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	11862 Orang	11846 Orang	99
2	2017	1862 Org	5726 Org	307
3	2018	1862 Org	1862 Org	100
4	2019	1862 Org	1862 Org	100
5	2020	1500 Org	1500 Org	100
6	2021	1500 Org	2816 Org	187

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

- 9) Jumlah relawan yang meningkat keterampilannya dalam penanganan bencana dan orang terlantar yang di pulangkan.

Tabel 3.14

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	76 Orang	60 Orang	79
2	2017	30 Orang	92 Orang	306
3	2018	117 Orang	33 Orang	28
4	2019	83 Orang	83 Orang	100
5	2020	36 Orang	36 Orang	100
6	2021	36 Orang	34 Orang	94

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

10) Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja peningkatan kualitas pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 3.15

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	1 Lap	1 Lap	100
2	2017	1 Lap	1 Lap	100
3	2018	40 Orang	40 Orang	100
4	2019	40 Orang	40 Orang	100
5	2020	1 Lap	1 Lap	100
6	2021	1 Lap	1 Lap	100

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

11) Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan sosial.

Tabel 3.16

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	156 Orang	261 Orang	167
2	2017	180 Orang	164 Orang	91
3	2018	55 Orang	45 Orang	82
4	2019	56 Orang	56 Orang	100
5	2020	525 Orang	525 Orang	100
6	2021	525 Orang	698 Orang	133

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

12) Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan sosial.

Tabel 3.17

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	170 Orang	500 Orang	294
2	2017	758 Orang	756 Orang	100
3	2018	531 Orang	531 Orang	100
4	2019	531 Orang	531 Orang	100
5	2020	33 Orang	16 Orang	48
6	2021	33 Orang	180 Orang	545

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada triwulan II, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terjadi refocussing / realokasi anggaran yang merubah target kinerja dari 33 Orang menjadi 180 Orang, dan terlaksana secara keseluruhan sehingga capaian kinerja menjadi 545%.

13) Jumlah korban tindak kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial.

Tabel 3.18

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	16 Orang	16 Orang	100
2	2017	36 Orang	36 Orang	100
3	2018	58 Orang	55 Orang	95
4	2019	58 Orang	58 Orang	100
5	2020	22 Orang	22 Orang	100
6	2021	22 Orang	15 Orang	13,6

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

14) Jumlah penyandang disabilitas yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial.

Tabel 3.19

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	99 Orang	99 Orang	100
2	2017	153 Orang	154 Orang	101
3	2018	133 Orang	135 Orang	101
4	2019	105 Orang	105 Orang	100
5	2020	101 Orang	22 Orang	22
6	2021	101 Orang	36 Orang	35,6

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada triwulan II, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terjadi refocussing / realokasi anggaran yang merubah target kinerja dari 101 Orang menjadi 36 Orang, dan terlaksana secara keseluruhan sehingga capaian kinerja menjadi 35,6%.

- 15) Jumlah penyandang Eks NAPZA dan Tuna Soisal (waria,WTS dan Eks Napi) yang mendapat kan bimbingan dan bantuan sosial.

Tabel 3.20

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	152 Orang	112 Orang	114
2	2017	54 Orang	34 Orang	81
3	2018	66 Orang	64 Orang	97
4	2019	46 Orang	46 Orang	100
5	2020	8 Orang	7 Orang	88
6	2021	8 Orang	30 Orang	375

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

- 16) Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial.

Tabel 3.21

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	50 Orang	50 Orang	100
2	2017	30 Orang	30 Orang	100
3	2018	30 Orang	30 Orang	100
4	2019	30 Orang	30 Orang	100
5	2020	18 Orang	-	-
6	2021	15 Orang	15 Orang	100

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada Tahun 2021, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan Covid - 19 hanya memperoleh anggaran secukupnya, sehingga mempengaruhi target program / kegiatan yang ada namun terlaksana secara keseluruhan sehingga capaian kinerja menjadi 100%.

17) Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial.

Tabel 3.22

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	25 Orang	25 Orang	100
2	2017	30 Orang	30 Orang	100
3	2018	30 Orang	30 Orang	100
4	2019	30 Orang	30 Orang	100
5	2020	30 Orang	-	-
6	2021	30 Orang	-	-

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

Pada triwulan II, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terjadi refocussing / realokasi anggaran dalam rangka percepatan

penanggulangan Covid - 19 yang mempengaruhi target program / kegiatan yang menyebabkan tidak adanya capaian kinerja.

18) Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial.

Tabel 3.23

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2016	85 Orang	85 Orang	100
2	2017	80 Orang	80 Orang	100
3	2018	75 Orang	65 Orang	87
4	2019	65 Orang	65 Orang	100
5	2020	50 Orang	50 Orang	100
6	2021	50 Orang	48 Orang	96

Sumber :Dinsos Prov. Sulteng, 2021.

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RPJMD 2016-1021.

Realisasi capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Target RENSTRA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RENSTRA 2016-2021	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Sasaran I : Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan	- Jumlah Keluarga Fakir Miskin di Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir dan Pulau-Pulau yang dapat memenuhi kebutuhan	12255 KK 49020 Jiwa	1583 KK 6332 Jiwa	12.91%

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RENSTRA 2016-2021	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
	kesejahteraan sosial.	dasarnya.			
2.	<p>Sasaran II :</p> <p>Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelegaraan kesejahteraan sosial (Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pengurus Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mengikuti Workshop. - Jumlah pengurus Karang Taruna yang mengikuti bimbingan manajemen. - Jumlah pengurus Organisasi Sosial yang mengikuti bimbingan manajemen. - Jumlah pengurus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mengikuti bimbingan sosial. - Jumlah kegiatan talkshow Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Barang (PUB) dan peringatan hari besar nasional kepahlawanan yang diselenggarakan - Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, relawan yang meningkat pengetahuannya serta Kabupaten yang mendukung pelaksanaan PKH 	<p>611 Org</p> <p>203 KT</p> <p>283 Orsos</p> <p>160 PSM</p> <p>45 Keg</p> <p>199407 Org</p>	<p>339 TKSK</p> <p>313 KT</p> <p>152 Orsos</p> <p>158 PSM</p> <p>25 Keg</p> <p>14124 Org</p>	<p>55.48%</p> <p>154.18%</p> <p>42.04%</p> <p>98.75%</p> <p>55.55%</p> <p>7.08%</p>

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target RENSTRA 2016-2021	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		- Jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar, Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO) yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	1610 Org	3688 Org	229.06%
		- Jumlah penyandang disabilitas yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial.	838 Org	452 Org	53.93%
		- Jumlah penyandang Eks NAPZA dan Tuna Soisal (waria,WTS dan Eks Napi) yang mendapat kan bimbingan dan bantuan sosial.	760 Org	181 Org	23.81%
		- Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial.	335 Org	115 Org	34,32%
		- Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial.	181 Org	90 Org	49,72%
		- Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial.	100 Org	308 Org	308%

3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sedang karena dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sasaran yang ada

terdapat 4 (empat) indikator capaian diatas 91%, 3 (tiga) indikator capaian 51% sampai dengan 65%, sedangkan indikator dibawah 50% terdapat 6 (enam) indikator atau kategori sangat rendah . Hal tersebut di sebabkan karna adanya Refocussing / Realokasi anggaran tahun 2021 serta dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan Covid-19 sehingga mempengaruhi target dari indikator program dan kegiatan.

3.1.5 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- **Sasaran Pertama, Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial** di dukung oleh program :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terprncil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya. Dimana pada tahun anggaran 2021 terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Sasaran pertama menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan program kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ada dalam SPKD 2021 (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2021) yaitu :

Tabel. 3.25

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4
		UNIT DINAS	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL - Pelatihan Bagi Keluarga Miskin Perdesaan	1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
	- Pelatihan Bagi Keluarga Miskin Perkotaan		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku
	- Pelatihan Bagi Keluarga Miskin Pesisir dan Pulau-pulau		Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat
			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan

- Sasaran Kedua, Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penyelegaraan kesejahteraan sosial (Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial) di dukung oleh program sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.26

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
		UNIT DINAS		
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan
	- Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha			2. Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
	Kesejahteraan Sosial			dalam Pelayanan Sosial
	- Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan serta Kesetiakawanan Sosial			3. Persentase SDM Kesos yang Profesional
	- Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan
2	PROGRAM PEMBINAAN POTENSI SUMBER KESOS		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat
	- Pemberdayaan Pekerja Sosial masyarakat		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1. Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,
	- Pemberdayaan Organisasi Sosial			2. Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos
	- Pemberdayaan Karang Taruna		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya
	- Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
	- Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyakut Cepat Ttanggap darurat		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
	- Perlindungan sosial korban bencana sosial	2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
	- Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Keluarga		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal
	- Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar
	- Rehabilitasi Anak Terlantar			2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
	- Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Perdagangan rang		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma		Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti
	- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di Dalam Panti
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial EKS Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Lainnya.		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
	- Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial		Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti
7	Program Pembinaan Anak Terlantar (UPT PSA)		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
	- Pembangan Bakat dan Keterampilan Anak terlantar		Penyediaan Makanan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
8	Program Pembinaan Tuna Sosial (UPT PSRTS)		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spritual dan bantuan sosial di Dalam Panti
	- Pembangan Bakat dan Keterampilan Tuna Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1. Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial dalam panti
9	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo (UPT PSTW Madago)			2. Jumlah dokumen penaganan gelandangan dan pengemis dalam panti
	- Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Dalam Panti		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial
		4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial
				2. Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan
			Penggangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku
			Penggangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
			Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan
		5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial
				2. Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan
			Penyediaan Permakanaan	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi
		6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Meningkatnya masyarakat yang menggunakan fasilitas TMPN Provinsi
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP
			UPT PSA	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatnya sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3			4
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
				Penyediaan Makanan	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti
				Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti
				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti
			UPT PSRTS		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatnya sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
				Penyediaan Permakanan	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3		4
				di Dalam Panti
			Penyediaan Sandang	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti
			Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti
			Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal
			UPT PSTW Tentena Madago	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti
			Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

NO	Program dan Kegiatan (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3			4
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti
				Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti
				Pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti

3.1.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2021

Tabel. 3.1
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

NO	PERJANJIAN KINERJA		% TARGET CAPAIAN KINERJA (100%)	TARGET BIAYA	PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
1	2	3	4	5	6	7
	UNIT DINAS		100,00%	26.536.089.117	23.806.667.897	89,71%
1.	- Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan)	1. Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	260.650.000	257.985.150	98,98%
		2. Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	100,00%	18.128.759.703	15.990.714.970	88,21%
		3. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100,00%	81.971.500	81.810.800	99,80%
		4. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100,00%	169.539.800	168.917.900	99,63%
		5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100,00%	381.492.500	377.410.000	98,93%
		6. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	737.258.829	729.135.343	98,90%
		7. Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100,00%	386.360.000	384.873.540	99,62%
2.	- Meningkatkan sumber	1. Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	100,00%	23.564.550	23.564.550	100,00%

	<p>daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial</p>	<p>2. - Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,</p> <p>- Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos</p>	100,00%	395.150.025	392.121.428	99,23%
3	<p>- Meningkatkan Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal</p>	100,00%	5.000.000	4.690.000	93,80%
4.	<p>- Meningkatkan Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	<p>1. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p>	100,00%	134.272.600	132.717.400	98,84%
		<p>2. Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</p>	100,00%	203.294.000	199.584.000	98,18%
		<p>3. Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</p>	100,00%	1.159.518.000	1.159.065.150	99,96%
		<p>4. - Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan sosial</p>	100,00%	124.498.075	121.727.417	97,77%

		dan bantuan sosial dalam panti				
		- Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam panti				
		5. Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	100,00%	120.014.500	119.023.074	99,17%
5.	- Meningkatkan Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	100,00%	20.000.000	19.966.000	99,83%
		2. Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	100,00%	3.281.067.600	2.730.516.440	83,22%
6.	- Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1. Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	100,00%	615.933.550	608.750.550	98,83%
7.	- Meningkatkan sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial	1. Meningkatnya masyarakat yang menggunakan fasilitas TMPN Provinsi	100,00%	307.743.885	304.094.185	98,81%
	UPT. PSA		100,00%	691.339.975	679.077.201	98,23%
8.	- Terwujudnya tata kelola pemerintah	1. Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	100,00%	110.694.000	109.144.000	98,60%
		2. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	216.108.250	208.379.326	96,42%

	n berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	3. Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100,00%	17.750.000	17.238.400	97,12%
9.	- Meningkatkan Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00%	346.787.725	344.315.475	99,29%
	UPT. PSRTS		100,00%	454.867.542	406.372.800	89,34%
10.	- Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	1. Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	100,00%	42.871.352	42.871.352	100,00%
		2. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	121.270.750	91.591.166	75,53%
		3. Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100,00%	12.517.800	8.574.632	68,50%
11.	- Meningkatkan Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00%	278.207.640	263.335.650	94,65%
	UPT. PSTW Madago		100,00%	1.091.530.297	1.076.631.554	98,64%

10.	- Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan)	1. Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	10.437.000	6.700.000	64,19%
		2. Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	100,00%	3.996.437	3.996.437	100,00%
		3. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	104.671.992	100.878.249	96,38%
		4. Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100,00%	42.200.000	42.100.000	99,76%
11.	- Meningkatkan Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00%	930.224.868	922.956.868	99,22%
JUMLAH TOTAL DINAS			100,00%	26.536.089.117	23.806.667.897	89,71%
JUMLAH TOTAL DINAS + UPT.			100,00%	28.773.826.931	25.968.749.452	90,25%

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021, sumber penganggaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari dua sumber yakni APBD dan APBN (Dana Dekonsentrasi) dengan rincian sebagai berikut:

APBD : Pagu Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 28.773.862.931,- (*dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*), realisasinya Rp. 25.968.749.452,- (*dua puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh delapan tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*) atau 90,25 %.

APBN : Alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 5.232.640.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*), realisasinya Rp. 5.189.663.500,- (*lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) atau 99,18%.

Realisasi keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 baik sumber dana APBD maupun APBN dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27
Realisasi Keuangan Dinas Sosial Tahun 2021 Sumber Dana APBD dan APBN

APBD

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
	UNIT DINAS						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Nilai SAKIP 3. Indeks Kepuasan Masyarakat	20.146.032.332	17.990.847.703	89,30%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.650.000	257.985.150	98,98%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	29.030.000	27.465.325	94,61%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	80.120.000	79.829.825	99,64%	

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	151.500.000	150.690.000	99,47%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	18.128.759.703	15.990.714.970	88,21%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	17.688.809.703	15.550.967.270	87,91%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	439.950.000	439.747.700	99,95%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	81.971.500	81.810.800	99,80%	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	81.971.500	81.810.800	99,80%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	169.539.800	168.917.900	99,63%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	5.000.000	5.000.000	100,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	10.000.000	10.000.000	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	154.539.800	153.917.900	99,60%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	381.492.500	377.410.000	98,93%	

	Urusan Pemerintah Daerah		Urusan Pemerintah				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	35.600.000	34.850.000	97,89%	
		Pegadaan Mebel	Jumlah Mebeler yang diadakan	25.000.000	24.900.000	99,60%	
		Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	200.892.500	198.375.000	98,75%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya	120.000.000	119.285.000	99,40%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.258.829	729.135.343	98,90%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	8.310.000	8.310.000	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.314.054	129.205.568	94,09%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	53.343.750	53.343.750	100,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	538.291.025	538.276.025	100,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	386.360.000	384.873.540	99,62%	

	Daerah							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan yang dipelihara	168.860.000	168.295.540	99,67%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung yang dipelihara	67.500.000	67.089.000	99,39%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	150.000.000	149.489.000	99,66%	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1. Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan 2. Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial 3. Persentase SDM Kesos yang Profesional		418.714.575	415.685.978	99,28%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	23.564.550	23.564.550	100,00%	

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	23.564.550	23.564.550	100,00%	
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		1.	Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,	395.150.025	392.121.428	99,23%	
			2.	Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos				
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi		Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	41.300.000	41.300.000	100,00%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	75.726.300	75.276.300	99,41%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	46.947.925	46.497.425	99,04%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan		Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	231.175.800	229.047.703	99,08%	

3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	5.000.000	4.690.000	93,80%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	5.000.000	4.690.000	93,80%	
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal	5.000.000	4.690.000	93,80%	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.	Persentase lanjut usia terlanjar, penyandang Disabilitas dan anak terlanjar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1.741.597.175	1.732.117.041	99,46%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
			2.	Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlanjar di Dalam Panti yang	134.272.600	132.717.400	98,84%	

		Disabilitas Terlantar di dalam Panti		terpenuhi kebutuhan dasarnya				
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	48.615.600	48.519.000	99,80%	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spritual di Dalam Panti	85.657.000	84.198.400	98,30%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	203.294.000	199.584.000	98,18%	
			Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	203.294.000	199.584.000	98,18%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1.159.518.000	1.159.065.150	99,96%	
			Penyediaan Makanan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	101.435.000	101.110.000	99,68%	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spritual dan bantuan	1.058.083.000	1.057.955.150	99,99%	

					sosial di Dalam Panti				
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		1.	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial dalam panti				
				2.	Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam panti	124.498.075	121.727.417	97,77%	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	124.498.075	121.727.417	97,77%	
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	120.014.500	119.023.074	99,17%	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial		Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	120.014.500	119.023.074	99,17%	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN			1.	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan	3.301.067.600	2.750.482.440	83,32%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi

SOSIAL			Jaminan Sosial				Tengah
			2. Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan				
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	20.000.000	19.966.000	99,83%	
		Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak	20.000.000	19.966.000	99,83%	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.281.067.600	2.730.516.440	83,22%	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat	72.220.750	71.960.090	99,64%	
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	118.742.000	117.997.200	99,37%	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan	3.090.104.850	2.540.559.150	82,22%	

6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1.	Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial	615.933.550	608.750.550	98,83%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
			2.	Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan				
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamiaian yang Siap Ditugaskan	615.933.550	608.750.550	98,83%	
		Penyediaan Permakanan		Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan	515.933.725	509.010.725	98,66%	
		Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	99.999.825	99.739.825	99,74%	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	307.743.885	304.094.185	98,81%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Meningkatnya masyarakat yang menggunakan fasilitas TMPN Provinsi	307.743.885	304.094.185	98,81%	

		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana Taman Makan Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi	100.000.000	99.560.000	99,56%	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	207.743.885	204.534.185	98,45%	
		UPT PSA						
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			344.552.250	334.761.726	97,16%	UPT PSA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	110.694.000	109.144.000	98,60%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.471.500	2.471.500	100,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan perlengkapan perkantoran	1.000.000	1.000.000	100,00%	
		Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Laporan penyediaan Bahan / Material perkantoran	1.830.000	1.830.000	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang	105.392.500	103.842.500	98,53%	

				dilaksanakan				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.108.250	208.379.326	96,42%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola	1.253.000	1.253.000	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.646.400	37.264.776	83,47%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah unit barang, peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5.548.950	5.547.050	99,97%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.659.900	164.314.500	99,79%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	17.750.000	17.238.400	97,12%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	17.750.000	17.238.400	97,12%	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatnya	346.787.725	344.315.475	99,29%	

				sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.				
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	346.787.725	344.315.475	99,29%	
			Penyediaan Makanan	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	123.100.000	123.090.000	99,99%	
			Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	24.931.250	24.900.000	99,87%	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	31.067.000	31.046.000	99,93%	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti	127.160.600	125.750.600	98,89%	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti	34.728.875	34.728.875	100,00%	

		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	3.000.000	3.000.000	100,00%	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	1.000.000	0		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	1.800.000	1.800.000	100,00%	
	Jumlah UPT. PSA				691.339.975	679.077.201	98,23%	
	UPT PSRTS							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				176.659.902	143.037.150	80,97%	UPT PSRTS
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	42.871.352	42.871.352	100,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.709.352	5.709.352	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	37.162.000	37.162.000	100,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	121.270.750	91.591.166	75,53%	

	Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola	1.999.000	1.325.000	66,28%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.478.400	20.572.816	41,58%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Umum Kantor yang dikelola	69.793.350	69.693.350	99,86%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	12.517.800	8.574.632	68,50%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	10.017.800	6.074.632	60,64%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	2.500.000	2.500.000	100,00%	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang Disabilitas, anak dan lanjut usia dalam panti, serta meningkatnya sinergitas penanganan tuna sosial. - Persentase lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi	278.207.640	263.335.650	94,65%	

				sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.				
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	278.207.640	263.335.650	94,65%	
		Penyediaan Permakanan		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	66.750.000	63.126.950	94,57%	
		Penyediaan Sandang		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	32.892.500	32.892.500	100,00%	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	47.019.140	41.735.800	88,76%	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	11.300.000	11.300.000	100,00%	
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti	105.531.000	99.565.400	94,35%	

		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	10.000.000	10.000.000	100,00%	
		Pemulangan ke Daerah Asal		Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal	4.715.000	4.715.000	100,00%	
	JUMLAH UPT. PSRTS				454.867.542	406.372.800	89,34%	
	UPT PSTW Tentena Madago							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				161.305.429	153.674.686	95,27%	UPT PSTW Tentena
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.437.000	6.700.000	64,19%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10.437.000	6.700.000	64,19%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	3.996.437	3.996.437	100,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.996.437	3.996.437	100,00%	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.671.992	100.878.249	96,38%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola	998.000	998.000	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.499.267	33.305.724	91,25%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan Umum Kantor yang dikelola	67.174.725	66.574.525	99,11%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	42.200.000	42.100.000	99,76%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	42.200.000	42.100.000	99,76%	
2		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan	930.224.868	922.956.868	99,22%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	930.224.868	922.956.868	99,22%	
		Penyediaan Permakanan		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam	840.450.000	840.090.000	99,96%	

				Panti				
			Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	20.544.000	20.544.000	100,00%	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	20.591.368	20.591.368	100,00%	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	14.795.500	14.267.500	96,43%	
			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	4.382.000	1.334.000	30,44%	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	3.382.000	2.230.000	65,94%	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	6.080.000	3.900.000	64,14%	
			Pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam	20.000.000	20.000.000	100,00%	

			Panti				
	JUMLAH UPT. PSTW			1.091.530.297	1.076.631.554	98,64%	
	JUMLAH TOTAL DINAS			26.536.089.117	23.806.667.897	89,71%	
	JUMLAH TOTAL DINAS + UPT.PSA + UPT.PSRTS + UPT.PSTW			28.773.826.931	25.968.749.452	90,25%	

APBN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
B	APBN				
1.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		196.096.000	193.696.000	98,78%
	Kegiatan : Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	1 Nilai hasil pengawasan kearsipan Kementerian dari ANRI 2 Jumlah dokumen rekomendasi analisis kebijakan bidang penyelenggaraan Kesos 3 Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial 4 Persentase (%) sarana prasarana yang terpelihara 5 Indeks pencapaian Renstra 6 Hasil (nilai) evaluasi SAKIP Kemensos	196.096.000	193.696.000	98,78%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		7 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Sosial 8 Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan program 9 Persentase daerah yang melaksanakan SPM bidang sosia			
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL		419.902.000	418.725.500	99,72%
	Kegiatan : Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	1 Perizinan Lembaga	50.000.000	50.000.000	100,00%
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	1 Persentase (%) Peningkatan Pihak-Pihak Yang Berperan Serta dalam Penanaman dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan 2 Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB tertib aturan 3 Persentase (%) Peningkatan Pihak-Pihak yang Berperan Serta dalam Pendayagunaan Nilai Kesetiakawanan Sosial 4 Persentase (%) TMPN/TMP/MPN yang direhab dan dipelihara	174.932.000	173.765.500	99,33%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	1 Indeks partisipasi sosial PSKS kelembagaan (karang Taruna, lembaga pemberdayaan peduli keluarga, forum CSR kesos dan LKS) 2 Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan SLRT	108.400.000	108.400.000	100,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi	3 Indeks partisipasi sosial PSKS perorangan (TKSK, PSM, dan Peksos) 4 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang diberdayakan 5 Kabupaten /Kota yang mengembangkan SLRT			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat	1 Presentase (%) KPM yang mendapatkan dukungan mitra usaha 1 Warga KAT Yang Mendapat Pemberdayaan Tahun I	34.390.000 52.180.000	34.390.000 52.180.000	100,00% 100,00%
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL		2.224.202.000	2.187.677.100	98,36%
	Kegiatan : Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana	1 Jumlah Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang mendapat bantuan 2 Jumlah Korban Bencana sosial yang mendapat bantuan 3 Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang siap ditugaskan 4 Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	1.113.482.000	1.103.957.100	99,14%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	1 Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat 2 KPM yang mengakses layanan Pendidikan 3 KPM yang mengakses layanan Kesehatan	1.110.720.000	1.083.720.000	97,57%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
		4 Kelompok Ibu-Ibu penerima manfaat PKH yang mendapatkan pendampingan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2/FDS) 5 Sumber Daya Manusia yang dikelola			
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL		2.213.350.000	2.211.206.800	99,90%
	Kegiatan : penyelenggaraan Program Sembako	1 Persentase (%) Keluarga Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Kemampuannya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	2.213.350.000	2.211.206.800	99,90%
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL		179.090.000	178.358.100	99,59%
	Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	1 Desa /Kelurahan Yang Mendapatkan Penyuluhan	179.090.000	178358100	99,59%
JUMLAH TOTAL			5.232.640.000	5.189.663.500	99,18%

BAB IV PENUTUP

Dokumen LAKIP Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini merupakan pencerminan atas capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggung jawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas serta kontribusi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sama sasaran kinerja. Meskipun terdapat beberapa faktor diluar kendali namun Dinas Sosial tetap memegang peranan terhadap capaian kinerja yang signifikan bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk sasaran strategis yang belum mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan harus dijadikan bahan kajian dan pemicu bagi perbaikan kinerja di tahun 2022.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan nilai capaian kinerja berskala baik karena dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sasaran yang ada terdapat 13 (tiga belas) indikator capaian diatas 91%, kemudian 1 (satu) indikator capaian diantara 66% samapai dengan 75% atau kategori sedang, sedangkan indikator dibawah 50% terdapat 5 (lima) indikator atau kategori sangat rendah . Hal ini dapat dilihat dari persentase indikator kinerja sasaran di atas 91% lebih banyak dibandingkan indikator yang berada dibawah 50%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan beberapa strategi antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan melalui penetapan data populasi sasaran

yang valid, intervensi program dan kegiatan yang tepat, peningkatan kapasitas pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 14 Februari 2022

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah



Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199103 2 006